

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Basuki, Johanes, 2013, *Budaya Pelayanan Publik*, Hartono Media Pustaka, Jakarta.
- Daliyo, J.B, et.al, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Danesjvara, Andhika, 2007, *Hukum dan Administrasi Publik, suatu Pengantar Kajian Hukum Dalam Konstruksi Manajemen Negara*, Badan Penerbit FHUI, Depok.
- International Maritime Organization, 2012, *Sharing Maritime Knowledge*, Maritime Knowledge Centre.
- Kelsen, Hans, 2008, *Pengantar Teori Hukum*, Nusa Media, Bandung.
- Lembaga Administrasi Negara, 1993, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*, CV Haji Masagung, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2005, *Mengenal Hukum*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.
- Moerdiono, Sarwono Kusumaatmadja *et al*, 1993, *Birokrasi dan Administrasi Pembangunan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Nugraha, Safri et. Al., 2007, *Hukum Administrasi Negara*, Centre For Law and Good Governance Studies, Depok.
- Prasetyo, Teguh, 2007, *Ilmu Hukum & Filsafat Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.



Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

Sinambela, Lijan Poltak, 2010, "*Reformasi Pelayanan Publik*", PT Bumi

Aksara, Jakarta.

Thoha, Miftah, 2002, *Perspektif Perilaku Birokrasi*, Rajagrafindo

Persada, Jakarta.

Tim Pengajar Pengantar Hukum Indonesia, 2008, *Pengantar Hukum*

Indonesia, FHUI, Depok.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara 5494).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara 5038).

Undang-Undang 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran
Negara 4849).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan
Lembaran Negara 3493).



Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 (Lembaran Negara RI

Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5108).

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di
Perairan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5208);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku di
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5668)

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut (Berita Negara
RI Tahun 2013 Nomor 1523).

TESIS

Margaretha G.M.I Mamoribo, “Perlindungan Hukum Terhadap Ciptaan
Motif Batik Tradisional Kota Jayapura Provinsi Papua”. (Tesis
UGM Yogyakarta, 2012).

INTERNET

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, “Visi &
Misi”. <http://hubla.dephub.go.id/profil/Pages/Visi-Misi.aspx>.

Diunduh 6 Maret 2016.



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT PADA SAAT PENGURUSAN
SURAT IZIN USAHA
PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT DI DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

ESTHER MADONNA, Prof. Dr. Nurhasan Ismail, S.H., M.Si.

Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

Kementerian Perindustrian, “Industri Maritim Butuh Investasi Lebih

Besar”. [http://www.kemenperin.go.id/artikel/7215/Industri-](http://www.kemenperin.go.id/artikel/7215/Industri-Maritim-Butuh-Investasi-Lebih-Besar)

[Maritim-Butuh-Investasi-Lebih-Besar](http://www.kemenperin.go.id/artikel/7215/Industri-Maritim-Butuh-Investasi-Lebih-Besar). Diunduh 13 Maret 2016.

Humas Perum Perindo, “Potensi Indonesia Sebagai Negara Maritim”.

[http://www.perumperindo.co.id/publikasi/artikel/171-potensi-](http://www.perumperindo.co.id/publikasi/artikel/171-potensi-indonesia-sebagai-negara-maritim)

[indonesia-sebagai-negara-maritim](http://www.perumperindo.co.id/publikasi/artikel/171-potensi-indonesia-sebagai-negara-maritim). Diunduh 10 April 2016.

Kompasiana, “Menyambut Kemaritiman Indonesia”.

[http://www.kompasiana.com/ridwan.fadilarif/menyambut-](http://www.kompasiana.com/ridwan.fadilarif/menyambut-kemaritiman-indonesia_54f92cdaa33311d33b8b4e36)

[kemaritiman-indonesia_54f92cdaa33311d33b8b4e36](http://www.kompasiana.com/ridwan.fadilarif/menyambut-kemaritiman-indonesia_54f92cdaa33311d33b8b4e36). Diunduh 13

Maret 2016.

Merdeka, “Peras Perusahaan Kapal di Belawan, 3 Pengurus Koperasi

Kena OTT”, [https://m.merdeka.com/peristiwa/peras-perusahaan-](https://m.merdeka.com/peristiwa/peras-perusahaan-kapal-di-belawan-3-pengurus-koperasi-kena-ott.html)

[kapal-di-belawan-3-pengurus-koperasi-kena-ott.html](https://m.merdeka.com/peristiwa/peras-perusahaan-kapal-di-belawan-3-pengurus-koperasi-kena-ott.html). Diunduh 2

Desember 2016.

Suara, “Polisi Akui OTT Kemenhub Terkait Administrasi Perkapalan”.

[http://m.suara.com/bisnis/2016/10/184502/polisi-akui-ott-](http://m.suara.com/bisnis/2016/10/184502/polisi-akui-ott-kemhub-terkait-administrasi-perkapalan)

[kemhub-terkait-administrasi-perkapalan](http://m.suara.com/bisnis/2016/10/184502/polisi-akui-ott-kemhub-terkait-administrasi-perkapalan). Diunduh 2 Desember

2016.